

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

#### **A. Formulasi Kebijakan**

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan tingkat daya saing (*competitiveness*), merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun akan relatif semakin tinggi.

Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi yang terjadi, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Mengingat pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Pasal 31 ayat 2: Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui



- peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pasal 2: Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi MEA; dan
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Pada konteks Kabupaten Bintan, strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi, maupun sektor swasta. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Perhatian Kabupaten Bintan untuk memperkuat daya saing juga tercermin dalam dokumen rencana pembangunan, dimana peningkatan daya saing adalah salah satu agenda strategis yang ingin dicapai. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan berorientasi pada peningkatan daya saing melalui pencapaian visi, misi, serta program kerja dengan melakukan inovasi pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan.

Kabupaten Bintan, dalam usaha meningkatkan daya saingnya, mengedepankan kebijakan pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan daerah; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; pembangunan infrastruktur; serta melakukan reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan aparatur negara.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah setidaknya tertuang pada Misi ke-1, Misi ke-2, dan Misi ke-4 dari RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Misi ke-1 adalah mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a) terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang; serta
- b) mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - b) Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Penataan Ruang;
  - c) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - d) Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD);
  - e) meningkatnya nilai produksi perikanan; serta berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok.
2. Misi ke-2 adalah mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
- Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:
- a) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman;
  - b) Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana; serta
  - c) Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum;
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan di kawasan perkotaan dan perdesaan; serta
- c) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan; serta terhubungnya aktivitas antar pulau.

3. Misi ke-4 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing;
- b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas; serta
- c) Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu;
- b) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B);
- c) Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa;
- d) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- e) Meningkatnya kualitas sasaran indikator infrastruktur pelayanan kesehatan dan tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- f) Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
- g) Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja; serta
- h) Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.



Tidak hanya itu, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 juga relevan dengan aspek daya saing yang terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor: 86 Tahun 2017. Aspek daya saing yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor: 86 Tahun 2017 terdiri atas 4 fokus, yaitu: Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi, dan Sumber Daya Manusia, sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan upaya peningkatan daya saing daerah dijabarkan sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1**  
**Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan**

Fokus	Arah Kebijakan
<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru.
	Melakukan Revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang perikanan dan pariwisata.
	Peningkatan produksi perikanan budidaya.
	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat.
	Memberdayakan koperasi dan UKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan.
	Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar.
<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus pada jalan dan jembatan.
	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi.
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar.
	Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran/sungai serta pembangunan drainase jalan.
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara.
<b>Iklim Investasi</b>	Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta



Fokus	Arah Kebijakan
	melalui promosi.
	Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi.
	Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sumber Daya Manusia	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata di kecamatan.
	Melaksanakan wajib belajar 9 tahun dengan cara melanjutkan upaya gratis biaya sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah.
	Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu.
	Meningkatkan pembinaan upaya kesehatan masyarakat, usaha pelayanan kesehatan lansia dan penyehatan lingkungan.
	Meningkatkan pembinaan upaya bina gizi masyarakat, serta kesehatan ibu dan anak.
	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
	Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat.
	Meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat.
	Pembentukan, pembinaan, dan pengembangan bina keluarga.
	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja diutamakan untuk para pemuda Bintan yang belum bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

## B. Extraordinary Strategy

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi





dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Komponen IDSD terdiri atas 4 aspek/faktor, 12 pilar, 23 dimensi, dan 78 indikator. Suatu daerah dengan nilai IDSD yang tinggi dapat diartikan diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya dalam menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Aspek, Pilar, Dimensi dan Indikator dalam IDSD**

No.	Aspek/Faktor	Pilar	Dimensi	Indikator
1.	Aspek Faktor Penguat	Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4
			Keamanan dan Ketertiban	1
		Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih	2
		Perekonomian Daerah	Kuangan Daerah	5
			Stabilitas Ekonomi	4
2.	Aspek Sumber Daya Manusia	Kesehatan	Kesehatan	1
		Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	6
			Keterampilan	3
3.	Aspek Pasar	Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	2
			Pajak dan Retribusi	3
			Stabilitas Pasar	1
		Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2
			Kapasitas Tenaga Kerja	3
		Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
4.	Aspek Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	5
		Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
			Penelitian dan Pengembangan	9
		Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3
			Telematika	2
			Teknologi	1

Sumber: Budhipura/Budhipraja Panduan TeknisPenilaian Anugerah Iptek, 2019



### C. Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan

Berdasarkan pada hasil pemetaan IDSD, nilai indeks daya saing Kabupaten Bintan secara keseluruhan adalah sebesar **7,578** untuk tahun 2019. Nilai indeks daya saing tersebut masuk dalam **kategori tinggi**. Jika diperhatikan berdasarkan nilai aspeknya, nilai aspek tertinggi dan berada diatas atau sama dengan nilai median (0,011) adalah sebesar 0,048 pada Aspek Sumber Daya Manusia, diikuti oleh Aspek Ekosistem Inovasi dengan nilai sebesar 0,011. Sedangkan nilai aspek Faktor Penguat (0,010) dan nilai aspek Faktor Pasar (0,007), berada dibawah nilai median, sehingga diperlukan perhatian dan kerja keras, untuk meningkatkannya.

**Tabel 2.3**  
**Nilai Aspek Indeks Daya Saing Daerah**

Aspek	Nilai
Sumber Daya Manusia	0,048
Ekosistem Inovasi	0,011
Faktor Penguat	0,010
Faktor Pasar	0,007

Sumber: Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan, 2019

Lebih lanjut, berdasarkan pada 12 pilar IDSD, terdapat 6 pilar yang memiliki nilai indeks diatas nilai median ( $>0,053$ ), yaitu pada pilar Kelembagaan; Infrastruktur; Kesehatan; Efisiensi Pasar Produk; Dinamika Bisnis; dan Kesiapan Teknologi. Sedangkan nilai indeks pada 6 pilar lainnya berada dibawah nilai median ( $<0,053$ ), yaitu Perekonomian Daerah; Pendidikan dan Keterampilan; Ketenagakerjaan; Akses Keuangan; Ukuran Pasar; serta Kapasitas Inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian, kerja keras, serta upaya-upaya untuk meningkatkan nilai indeks pilar yang belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah**

<b>Nilai Indeks Pilar &gt; Nilai Median (0,053)</b>	<b>Pilar</b>	<b>Nilai Indeks Pilar</b>
	Kelembagaan	0,108
	Infrastruktur	0,065
	Kesehatan	0,200
	Efisiensi Pasar Produk	0,057
	Dinamika Bisnis	0,059
	Kesiapan Teknologi	0,060
	<b>Pilar</b>	<b>Nilai Indeks Pilar</b>
<b>Nilai Indeks Pilar &lt; Nilai Median 0,053</b>	Perekonomian Daerah	0,033
	Pendidikan dan Keterampilan	0,039
	Ketenagakerjaan	0,049
	Akses Keuangan	0,018
	Ukuran Pasar	0,013
	Kapasitas Inovasi	0,010
	<b>Pilar</b>	<b>Nilai Indeks Pilar</b>

Sumber: Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan, 2019

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai daya saing Kabupaten Bintan, pengamatan perlu dilakukan pada 23 dimensi IDSD. Berdasarkan pada nilai indeks atas 23 dimensi tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat 11 dimensi yang memiliki nilai indeks diatas nilai median ( $>0,133$ ), dan 12 dimensi yang memiliki nilai dibawah median ( $<0,133$ ).

Dimensi-dimensi tersebut adalah Tata Kelola Pemerintahan; Keamanan dan Ketertiban; Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan; Keuangan Daerah; Kesehatan; Kompetisi Dalam Negeri; Stabilitas Pasar; Ketenagakerjaan; Kapasitas Tenaga Kerja; Regulasi; Kewirausahaan; dan Teknologi. Sedangkan dimensi yang belum optimal adalah Infrastruktur Transportasi; Stabilitas Ekonomi; Pendidikan; Keterampilan; Pajak dan Retribusi; Akses Keuangan; Ukuran Pasar; Interaksi dan Keberagaman; Penelitian dan Pengembangan (R&D); Komersialisasi dan Telematika.

Untuk lebih jelasnya mengenai nilai indeks pada masing-masing pilar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Nilai Dimensi Indeks daya Saing Daerah**

<b>Nilai Dimensi &gt; Nilai Median (0,133)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Nilai Indeks Dimensi</b>
	Tata Kelola Pemerintahan	0,465
	Keamanan dan Ketertiban	0,400
	Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	0,200
	Keuangan Daerah	0,210
	Kesehatan	1,000
	Kompetisi Dalam Negeri	0,525
	Stabilitas Pasar	0,250
	Ketenagakerjaan	0,133
	Kapasitas Tenaga Kerja	0,260
	Regulasi	0,135
	Kewirausahaan	0,160
	Teknologi	0,600
<b>Nilai Dimensi &gt; Nilai Median (0,133)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Nilai Indeks Dimensi</b>
	Infrastruktur Transportasi	0,060
	Stabilitas Ekonomi	0,050
	Pendidikan	0,058
	Keterampilan	0,040
	Pajak dan Retribusi	0,080
	Akses Keuangan	0,050
	Ukuran Pasar	0,067
	Interaksi dan Keberagaman	0,018
	Penelitian dan Pengembangan (R&D)	0,033
	Komersialisasi	0,027
	Telematika	0,000

Sumber: Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan, 2019

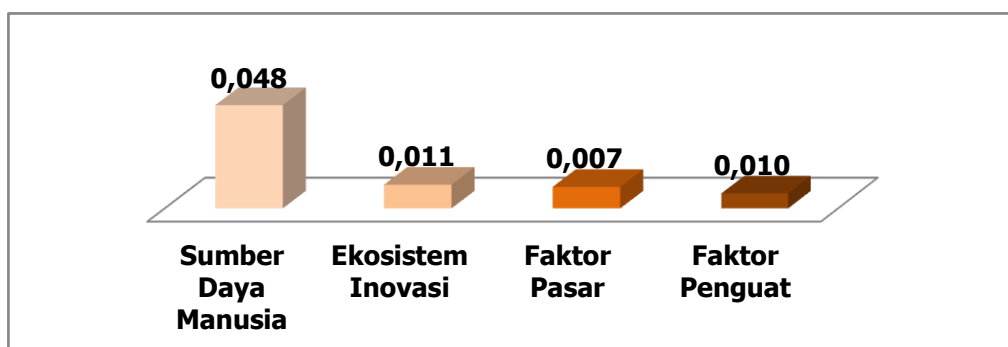
Nilai indeks pada dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan serta peningkatan bagi Kabupaten Bintan. Untuk tahap awal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat fokus dalam membenahi dimensi-dimensi yang belum menunjukkan performa optimal.

Pembenahan dapat dilakukan dengan memberikan prioritas atas dimensi-dimensi tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun anggaran 2020 berdasarkan pada hasil pemetaan IDSD. Beberapa dimensi yang belum optimal dapat digali permasalahannya dengan lebih mendalam dan/atau dikembangkan model-model untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### **D. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Penelitian**

Kabupaten Bintan perlu meningkatkan kegiatan penelitian dan pengkajian sesuai dengan hasil pemetaan IDSD. Nilai Aspek IDSD Kabupaten Bintan yang tertinggi adalah Sumber Daya Manusia (0,048), diikuti oleh Ekosistem Inovasi (0,011), Faktor Pasar (0,010), serta Faktor Penguat (0,007). Oleh karenanya, kerangka kebijakan penelitian diharapkan dapat fokus pada pengembangan aspek dengan daya saing tertinggi, yakni Sumber Daya Manusia diikuti oleh penelitian dan pengembangan pada aspek ekosistem inovasi (dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi), dilanjutkan dengan faktor pasar (efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar), serta faktor-faktor penguat (kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah).

**Gambar 2.1**  
**Nilai Aspek IDSD Kabupaten Bintan 2019**



Sumber: Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan, 2019

#### **E. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan**

Berdasarkan pada hasil pemetaan IDSD yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.6  
Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Aspek, Pilar,  
dan Dimensi IDSD

Aspek	Pilar	Dimensi
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	Kesehatan
	Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan
		Keterampilan
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	Regulasi
		Kewirausahaan
	Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman
		Penelitian dan Pengembangan (R&D)
	Kesiapan Teknologi	Komersialisasi
		Telematika
Teknologi		
Faktor Pasar	Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri
		Pajak dan Retribusi
		Stabilitas Pasar
	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
	Akses Keuangan	Kapasitas Tenaga Kerja
		Akses Keuangan
Faktor Penguat	Ukuran Pasar	Ukuran Pasar
	Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan
		Keamanan dan Ketertiban
	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
		Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan
Perekonomian Daerah	Kuangan Daerah	
	Stabilitas Ekonomi	

Sumber: Pemetaan IDSD Kabupaten Bintan, 2019

Keterangan:

Diatas nilai median

Dibawah nilai median

Penelitian dan pengkajian untuk peningkatan daya saing daerah perlu dilakukan sebagai upaya awal untuk mengidentifikasi tantangan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Bintan. Penelitian dan pengkajian juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para stakeholder dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengkomunikasikan kebijakan.

Temuan dari penelitian dan pengkajian kemudian dipergunakan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan stakeholders terkait serta dapat



pula bertindak sebagai upaya pemberian alternatif dalam menyusun program-program pembangunan terutama untuk peningkatan daya saing dan inovasi daerah Kabupaten Bintan. Sehingga diharapkan adanya peningkatan nilai IDSD Kabupaten Bintan pada tahun berikutnya.